

**PROSPEK PTP KELAPA SAWIT SURYA RAYA TERHADAP
PENINGKATAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN MAMUJU
(Studi Kasus di Kecamatan Budong-budong)**



BOSUWA

OLEH :

MASRIADI NADI ATJO

Stb/Nirm : 4595011060/9951110410320

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS " 45 "
MAKASSAR**

2000

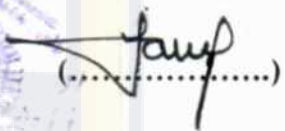
HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Kamis , 21 Desember 2000
Skripsi Atas Nama : **MASRIADI NADI ADJO**
Nomor Stb / Nirm : 4595011060 / 9951110410320

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan STUDI PEMBANGUNAN.

PENGAWAS UMUM

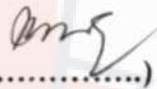
DR. ANDI JAYA SOSE SE, MBA.
(Rektor Universitas "45" Makassar)



(.....)

KETUA

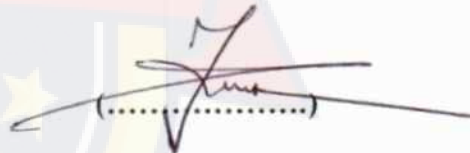
SUKMAWATI MARDJUNI, SE, MSi.
(Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45")



(.....)

SEKRETARIS :

IRWAN, SE.



(.....)

ANGGOTA PENGUJI :

1. **PALIPADA PALISURI, SE, MSi.**



(.....)

2. **Dra ANDI HIMAYAH TAHIR, MSi.**



(.....)

3. **RAFIUDDIN, SE.**



(.....)

4. **HAERUDDIN SALEH, SE.**



(.....)

HALAMAN PENGESAHAN

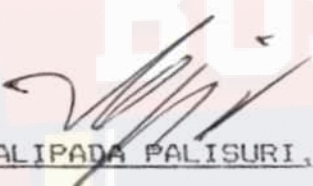
Judul Skripsi : Prospek PTP Kelapa Sawit Surya Raya
Terhadap Peningkatan Penyerapan Tenaga
Kerja di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus
Kecamatan Budong-Budong)

Nama Mahasiswa : MASRIADI NADI ATJO
No. Stb/Nirm : 4595011060/9951110410320
Jurusan : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Program Studi : Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. PALIPADA PALISURI, MSi)

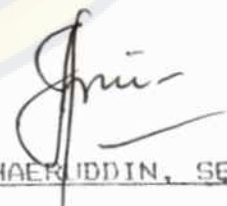

(HAERUDDIN, SE)

Mengetahui dan Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
& Studi Pembangunan


(SUKMAWATI MARDJUNI, SE, MSi)


(HAERUDDIN, SE)

Tanggal Pengesahan:

KATA PENGANTAR

Fuji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas Taufiq dan Hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hj. Salmiah dan ayahanda H. Nadi Atjo serta saudara dan semua keluarga. Karena atas doa dan bantuannya sehingga memperoleh kemudahan menyelesaikan tugas akademik. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga Hj. Muliana Irham, SH sekeluarga atas bantuannya kepada penulis selama ini.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari Bapak Drs. Palipada Palisuri, MSi dan Bapak Haeruddin, SE selaku pembimbing I dan II dan atas segala bantuan dan bimbingannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Dr. A. Jaya Sose, MBA.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Sukniawti, SE, MSi.



3. Ketua Jurusan Studi Pembangunan Bapak Haeruudin, SE.
4. Seluruh staf dan civitas akademik serta seluruh teman yang banyak membantu selesainya tugas ini.

Kepada semua pihak yang berkenaan memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan penulis tidak lupa mengempalkan terima kasih.

Akhirnya penulis mengharap kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif agar tulisan ini dapat diperbaiki.

Makassar, November 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Hipotesis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pembangunan	6
2.2 Pengertian Tenaga Kerja	8
2.3 Pengertian Kesempatan Kerja	12
2.4 Pengertian Pengangguran	16
2.5 Pentingnya Penyerapan pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju	18
2.6 Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Daerah Penelitian	25
3.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data	25

	Halaman
3.3 Peralatan dan Metode Analisis	26
3.4 Kerangka Operasional	27
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	29
4.1 Kondisi Wilayah	29
4.2 Potensi Sumber Daya Manusia	30
4.3 Keadaan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Mamuju	33
4.4 Beberapa Kebijakan Sub Sektor Per- kebunan di Kabupaten Mamuju	49
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Tinjauan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PTP. Surya Raya Lestari II	55
5.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Per- kebunan Inti Rakyat (PIR) PTP. Surya Raya Lestari II	61
5.3 Areal Tanaman Kelapa Sawit PTP. Surya Raya Lestari II	65
5.4 Tenaga Kerja Perkebunan Inti Rakyat .	69
5.5 Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mamuju	72
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Simpulan	77
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penduduk Kabupaten Mamuju Hasil Sensus Tahun 1995 dan Perkiraan Dirinci Perkelompok Umur Sampai Tahun 2000	31
Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Komoditi Perkebunan Kabupaten Mamuju (1995/1996-1999/2000)	36
Tabel 3. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Setiap Tahun di Kabupaten Mamuju 1995/1996-1999/2000	38
Tabel 4. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Mamuju 1999/2000	40
Tabel 5. Pemanfaatan Lahan Yang dapat di Konversi di Kabupaten Mamuju Tahun 1995/1996-1999/2000	42
Tabel 6. Luas dan Lokasi Kegiatan Pemegang HPH di Kabupaten Mamuju Tahun 1998/1999	45
Tabel 7. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Menurut Tahun 1998/1999 (Dalam Hektar)	46
Tabel 8. Sasaran Program/Proyek Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Mamuju Dalam Pelita VI (selama lima tahun)	53
Tabel 9. Perkembangan Realisasi Kebun Inti dan Plasma Tahun 1995/1996	56
Tabel 10. Realisasi Pemanfaatan Warga Transmigrasi PTP. Surya Raya Lestari II Tahun 1995/1996	57
Tabel 11. Realisasi Perkembangan Personil Aparat Pemerintah yang Bertugas di Wilayah PIR PKS Budong-Budong Tahun 1998/1999	59
Tabel 12. Realisasi Pemanfaatan Lahan Pangan dan Pekarangan Petani Transmigrasi Tahun 1998/1999	60

Tabel 13. Sarana dan Prasarana Pendukung PIR PTP Surya Raya Lestari II Tahun 1998/1999...	62
Tabel 14. Keadaan Jumlah dan Jenis Alat Berat, Kendaraan, dan Mesin-Mesin yang Dimiliki Perusahaan Inti Sampai Dengan Tahun 1999	64
Tabel 15. Perkembangan Areal Tanaman Kelapa Sawit PIR PKS Tahun 1994/1995-1999/2000	66
Tabel 16. Dosis Umum Pemupukan Kelapa Sawit (Gram/Pohon/Tahun)	68
Tabel 17. Data Keadaan Tenaga Kerja (Buru Perkebunan) Yang Terserap pada Perkebunan Inti Rakyat Selama (Tahun 1994/1995-1999/2000)	71
Tabel 18. Data Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	72
Tabel 19. Data Pengamatan luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PTP. Surya Raya Lestari II dan Penyerapan Tenaga Kerja	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses peningkatan dan pertumbuhan pembangunan nasional, sektor pertanian masih mendapat prioritas utama karena sektor ini merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian nasional. Kontribusi sektor ini cukup besar peranannya dalam pemberian lapangan kerja serta dalam menambah devisa negara.

Sarana utama pembangunan nasional jangka panjang yang tertuang dalam GBHN, adalah terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dengan titik berat pada sektor industri yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sasaran tersebut akan dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian PELITA yang bergerak dalam pengembangan potensi ekonomi, dan merupakan sasaran pembangunan nasional yang harus diwujudkan.

Pembangunan pertanian berlanjut, adalah salah satu bagian dari pembangunan nasional yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi yang cukup tinggi. Bagi Indonesia, keberadaannya sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, sangat perlu mengembangkan agri-industri dan agribisnis yang mantap.

Dalam kaitan inilah masalah ketenagakerjaan di sektor pertanian harus memiliki relevansi yang kuat dalam menciptakan keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya dalam pembangunan.

Berbagai macam kebijaksanaan yang telah ditempuh sebagai upaya keras dalam meningkatkan produktifitas pertanian, di antaranya adalah penentuan skala prioritas, pembukaan lahan atau areal pertanaman pada sub sektor perkebunan, dengan harapan akan memberikan efek positif dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Secara teknis, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, baik yang bersifat umum, sektoral maupun langkah-langkah kebijakan yang bersifat khusus. Kebijakan yang bersifat khusus, antara lain di bidang fiskal, moneter dan upah. Sedang kebijakan sektoral mencakup peningkatan pendidikan, penentuan skala prioritas investasi, pengembangan industri padat karya, pemilihan teknologi tepat guna, serta penciptaan kesempatan kerja baru di bidang pertanian, khususnya pada sub sektor perkebunan.

Salah satu inflikasi dari kebijakan tersebut, adalah pembangunan sub sektor perkebunan yang secara langsung dikaitkan dengan transmigrasi nasional dengan sasaran utama, adalah menciptakan proyek padat karya yang

dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis akan meneliti keberadaan kelapa sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.

Latar belakang pemilihan objek penelitian ini, adalah karena secara geografis sangat strategis dalam mendukung studi kelayakan, berhubung penulis berdomisili di daerah tersebut. Selain itu pula, obyek penelitian ini sangat relevan dengan bidang studi yang penulis tekuni, yaitu Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Dapat dijelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju merupakan perkebunan besar yang dikelola oleh PTP. Surya Raya Lestari II. Keberadaan perusahaan perkebunan ini terkait langsung dengan program transmigrasi di Kabupaten Mamuju, dimana para transmigrasi merupakan tenaga kerja utama yang dipekerjakan pada perusahaan tersebut.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit ini dilaksanakan berdasarkan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yakni penggabungan antara Perkebunan Inti dan Perkebunan Plasma. Perkebunan Inti adalah perkebunan yang secara langsung dibawah oleh perusahaan Inti, sedangkan Perkebunan Plasma adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat (Warga transmigrasi).

PIR Surya Raya Lestari II secara khusus melaksanakan program disub sektor perkebunan dengan melibatkan warga transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah, dengan sasaran pokok adalah peningkatan⁷ produktivitas perusahaan, peningkatan pendapatan petani warga transmigran, serta peningkatan nilai tambah guna mengangkat harkat dan martabat petani di Kabupaten Mamuju. Realisasi kelapa sawit ini dikelola melalui peningkatan areal perkebunan (lahan perkebunan), penyerapan tenaga kerja. Dengan menerapkan sistem intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan peningkatan kemampuan tenaga PPL.

Dengan demikian keberadaan PIR Surya Raya Lestari II sebagai perusahaan perkebunan besar yang pada karya, diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja atau dengan kata lain mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (warga transmigrasi) sebagai salah satu upaya dalam proses pemerataan pendapatan dalam pembangunan.

1.2 Masalah Pokok

Seberapa besar Perkebunan Kelapa Sawit dapat menyerap tenaga kerja di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

1. Untuk mengungkapkan eksistensi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju khususnya dalam aspek penyerapan tenaga kerja dan relevansinya dengan aspek perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mendapatkan data atau informasi guna penyusunan skripsi ini.

1.3.2. Kegunaan

1. Sebagai media dalam mengaktualisasikan diri, terutama dalam menuangkan buah pikiran melalui karya ilmiah ini.
2. Sebagai bahan masukan bagi kantor atau instansi teknik terkait, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan dalam sub sektor perkebunan.

1.4. Hipotesis

Diduga bahwa peranan PTP. Kelapa Sawit Surya Raya mempunyai kontribusi yang besar. Terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mamuju.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Pembangunan

Istilah pembangunan pada hakekatnya lebih luas dari ekonomi, karena pembangunan ekonomi hanya merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional mencakup pembangunan fisik dan mental atau pembangunan Indonesia seutuhnya.

Secara historis melalui proses pembangunan negara-negara yang kini telah maju tampaknya telah berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat dari lembah kemiskinan ketingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat mengecap nikmat kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Konseptualisasi tentang pembangunan dapat ditelaah dari berbagai pendapat atau defenisi, sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, (1998, hal. 4) yang menafsirkan defenisi pembangunan sebagai upah menambah pendapatan dan menaikkan produktivitas perkapita dalam waktu secepat-cepatnya. Pembangunan ekonomi menurut penafsiran Soemitro adalah penambahan pendapatan dan kenaikan produktivitas yang pada pokoknya hanya tercipta dengan menambah peralatan

modal dan skill). Pengertian ini lebih menekankan pada kenaikan aspek pendapatan dan produktivitas perkapita. Pendapatan dapat bertambah dengan menambah jam kerja, tenaga kerja atau keduanya.

Prof. Dr. Bintoro Tjokroamidjodjo dalam bukunya teori strategi pembangunan nasional, (1990, hal. 1) mengemukakan bahwa pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tampak akhir. Development is not a static concept it is continuously changing. Pengertian ini mengidentikkan antara pembangunan dan perkembangan, dimana harus terjadi perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi dan kebudayaan.

Michael. P. Todaro dalam bukunya pembangunan ekonomi di dunia ketiga (1998, hal. 124-125) mengartikan pembangunan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan/ekselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Todaro menekankan bahwa pembangunan pada hakekatnya haruslah menyuarakan seluruh nada dasar (gamet) perubahan

yang dengan berbagai dasar kebutuhan dan keinginan masing-masing individual dan kelompok-kelompok masyarakat yang bernaung di dalam sistem itu, bergerak maju dari kondisi yang serba kekurangan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, baik material maupun spritual. Pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro ini, mencakup aspek multidimensional yang berarti seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam hubungan ilmiah GBHN telah menegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan itu harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir bathin secara adil dan merata. Selanjutnya, berhasilnya pembangunan nasional tergantung pula pada partisipasi seluruh masyarakat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh pelosok tanah air.

2.2 Pengertian Tenaga Kerja

Pembahasan tentang masalah tenaga kerja pada prinsipnya merupakan isu global yang sangat menarik. Kenyataannya menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan ini termasuk salah satu agenda pokok dalam pembangunan. Hal disebabkan karena aspek tenaga kerja yang ada tidak dapat diimbangi dengan aspek penyediaan lapangan kerja, atau dengan kata lain bahwa populasi tenaga kerja yang

antri di pasaran kerja tidak seimbang dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga pengangguran semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Analisis tentang tenaga kerja ini harus berlandaskan pada kenyataan, bahwa di Indonesia tidak menganut batas maksimum usia tenaga kerja karena belum ada jaminan sosial nasional.

Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Di Indonesia yang dianggap tenaga kerja adalah batas umur minimum 10 tahun. Menurut Paymand Simanjuntak (1998, hal. 1) mendefinisikan bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (*working-age population*).

Oleh sebab itu, pengertian tenaga kerja mengandung dua aspek, yakni aspek kuantitas dalam arti penduduk yang bisa bekerja dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 termaktub bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak memperoleh pekerjaan dan pemerintah wajib menciptakan lapangan kerja yang layak bagi kehidupan kemanusiaan.

Implikasi pengertian tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh upah atau penghasilan yang sepadan dengan jasa kerja yang diusahakannya pada suatu kegiatan ekonomi produksi.

Secara definitif banyak pakar mengemukakan batasan atau pengertian tentang tenaga kerja, seperti halnya yang dikemukakan oleh Mubyarto dalam bukunya pengantar ekonomi pertanian (1997, hal. 121) bahwa yang dimaksud tenaga kerja adalah seluruh penduduk di dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok ketentuan tenaga kerja (1968, pasal 1 ayat 1), dimaksud tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, baik tenaga kerja dalam keluarga maupun di luar keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga adalah tenaga kerja yang memberikan sumbangan kerja dan tidak dinilai dalam bentuk uang, sedangkan tenaga di luar keluarga adalah tenaga kerja yang memperoleh keuntungan dengan jalan menghasilkan barang atau jasa dengan memperoleh imbalan berupa uang.

Dari berbagai definisi tentang tenaga kerja tampak bahwa setiap orang yang bekerja atau orang yang meng-

hasilkan barang dan jasa tergolong sebagai angkatan kerja. Orang yang tergolong mampu menghasilkan barang atau jasa inilah yang disebut *employed persons*. Sebagian lain tergolong setiap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mereka disebut mencari kerja atau penganggur. Jumlah orang yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja (*labour force*). Dengan demikian angkatan kerja berarti orang yang sedang bekerja, pencari kerja dan pengangguran. Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau *demand* dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Seseorang dalam pasar kerja, berarti sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

A. Benggolo dalam bukunya tenaga kerja pada pembangunan (1997, hal. 5) mengemukakan bahwa yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi dan yang mereka belum bekerja tetap sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja adalah bagian dari penduduk pada

usia kerja atau bagian dari tenaga kerja yang terlihat dalam kegiatan produktif. Sedangkan yang tidak tergolong angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang tidak bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan.

Adapun yang tergolong tenaga kerja, tetapi tidak termasuk angkatan kerja adalah seperti yang dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (1998, hal. 3) antara lain:

- a. Mereka yang kegiatannya hanya bersekolah.
- b. Mereka yang kegiatannya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
- c. Penerimaan pendapatan tetap, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh penghasilan.
- d. Mereka yang hidup bergantung pada orang lain, disebabkan antara lain oleh usia lanjut, sakit kronis dan sebagainya.

2.3 Pengertian Kesempatan Kerja

Analisa mengenai kesempatan kerja pada prinsipnya tercermin dalam bentuk tersediannya kerja. Semakin banyak bentuk lowongan kerja yang tersedia semakin sedikit pula peluang kesempatan kerja. Dalam hubungan ini faktor kerja dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi dan budaya. Oleh sebab itu analisa ketenagakerjaan yang menggunakan

pendekatan kerja jauh lebih simpel karena dapat menggambarkan antara orang yang bekerja dan pengangguran.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua angkatan kerja memiliki peluang memperoleh kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan tenaga kerja, daya seleksi yang tekad dari penerima kerja (majikan) pada umumnya serta keterbatasan pilihan dari para pencari kerja untuk memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka.

Besar kecilnya peluang kesempatan kerja yang tersedia ditentukan pula oleh jumlah permintaan tenaga kerja atau demand dalam pasaran kerja. Dalam kegiatan ini aspek kesempatan kerja berhubungan dengan kegiatan ekonomi, terutama sekali aspek perluasan bidang-bidang pekerjaan tertentu dalam sektor pembangunan. Semakin besar permintaan jumlah tenaga kerja berarti semakin besar kegiatan ekonomi yang terlaksana dan akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja.

Jadi kesempatan kerja adalah jumlah bentuk lowongan kerja yang tersedia pada waktu tertentu. Besarnya kesempatan kerja bagi seseorang akan berpengaruh dalam Tingkat Partisipasi Kerja (TPK). Dengan demikian mudah dipahami bahwa besar kecilnya kesempatan kerja seseorang dipengaruhi pula oleh skill, jumlah dalam pasar kerja, serta bentuk-bentuk lowongan kerja yang tersedia.



Dari berbagai pengertian tenaga kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja dengan menghasilkan barang atau jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejalan dengan penyediaan kerja terampil, maka pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini penyediaan tenaga kerja seperti itu terasa sangat mendesak terutama dalam mengelolah proyek-proyek pembangunan.

Sebagai kerangka teoritik dalam pembahasan tenaga kerja ini akan dilansir berbagai pendapat, antara lain oleh Biro Pusat Strategis Perburuhan Departemen Perburuhan Amerika Serikat yang dialih bahasakan oleh Arie Benggolo (1997, hal. 13) mengatakan bahwa angkatan kerja adalah semua orang yang bekerja sendiri atau untuk orang lain, seperti para pengusaha (majikan) di dalam pertanian atau perusahaan termasuk pelamar kerja dan angkatan-angkatan perang.

Yudo Swasono dan Endang Sulastiningsi (1998, hal. 20) mengatakan angkatan kerja (labour force) adalah bagian dari penduduk pada usia kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja yang masih mampu dan mau melaksanakan pekerjaan.

Biro Pusat Statistik dalam bukunya sensus penduduk Indonesia 1996 (1997, hal. Pendahuluan) menengaskan bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi, dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Yang tidak tergolong angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, para pensiunan dan usia lanjut serta mereka yang karena keadaan fisiknya tidak mampu bekerja.

Dari keseluruhan uraian tersebut tampak bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Angkatan kerja belum tentu merupakan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja sudah pasti masuk kategori angkatan kerja, atau dengan kata lain angkatan kerja pengertiannya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian tenaga kerja.

Yudo Swasono (1998, hal. 20) mengemukakan bahwa istilah kesempatan kerja (employment) dan lowongan (vacancy) mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi produksi. Pengertian lowongan mengandung adanya kesempatan sehingga timbul kebutuhan tenaga kerja.

Kebutuhan ketenagakerjaan yang selanjutnya diperlukan secara riil oleh perusahaan/lembaga penerima kerja pada tingkat upah tertentu, posisi dan syarat-syarat kerja melalui advertensi dan lain-lain disebut lowongan (vacancy).

2.4 Pengertian Pengangguran

Untuk menganalisis pengertian pengangguran, maka terlebih dahulu perlu diketahui faktor penyebab timbulnya pengangguran. Pengangguran menurut sebabnya pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori: pertama, pengangguran karena kekurangan permintaan agregat tenaga kerja secara efektif dan kedua pengangguran disebabkan oleh ketidak lancarannya pasar kerja. Kategori pengangguran yang menyangkut kekurangan permintaan tenaga kerja secara agregate terjadi apabila kesempatan kerja yang tercapai oleh pertumbuhan ekonomi, tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Faktor kekurangan permintaan tenaga kerja inilah yang paling banyak terjadi biasanya dinamakan pengangguran konjungtur.

Kategori lain yaitu pengangguran musiman. Untuk negara agraris seperti Indonesia pengangguran musiman mempunyai banyak pengaruh pada penggunaan tenaga kerja dan mengakibatkan terjadinya urbanisasi musiman. Jenis

pengangguran kedua yaitu terjadi karena kekurangan fungsinya pasar kerja. Keadaan ini seringkali menunjukkan adanya lowongan pekerjaan disatu pihak dan terdapat tenaga kerja yang belum di lain pihak, dimana pada saat yang bersamaan jumlah dan jenis tenaga kerja adalah sama.

Jelaslah bahwa batasan pengangguran berbeda dari tiap-tiap negara dan dapat berubah menurut waktu. Soeroto, MA, mengemukakan pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan memperolehnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan dan terus mempunyai keinginan untuk memperoleh pekerjaan, tetapi belum memperolehnya selama seminggu sebelum dilakukan pencacahan tenaga kerja.

Menurut Payaman J. Simanjuntak dalam bukunya pengantar ekonomi sumber daya manusia, bahwa yang tergolong pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran adalah perbandingan jumlah angkutan kerja yang dinyatakan dalam persen (%).

Dengan demikian ditinjau dari sebab terjadinya pengangguran dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Pengangguran friksional terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari

kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berhenti sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kekurangan informasi.

Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian itu memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja, misalnya dalam suatu pergesekan dari ekonomi yang berat, agraris menjadi ekonomi yang berat industrial. Disatu pihak akan terjadi pengangguran tenaga kerja disektor pertanian dan di lain pihak akan terjadi penambahan kebutuhan tenaga kerja disektor industri.

Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim, dimana seringkali di luar musim panen banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomi.

2.5 Pentingnya Penyerapan Tenaga Kerja pada Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju

Eksistensi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Budong-Budong yang dikelola oleh PTP. Surya Raya Lestari II merupakan proyek perkebunan besar swasta yang dikaitkan dengan program transmigrasi. Pengelolaan proyek perkebunan ini merupakan implementasi program

pemerintah di bidang pemerataan kesempatan kerja, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam kenyataannya keberadaan warga transmigrasi di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju ditinjau dari segi kondisi sosial ekonominya menunjukkan suatu tingkat hidup yang relatif rendah, dimana mereka pada umumnya berada dalam suatu lingkungan keterisolasian dengan kemiskinan absolut yang berkepanjangan.

Oleh sebab itu dengan adanya perkebunan besar yang mengelolah kelapa sawit diharapkan dapat menyerap tenaga kerja warga transmigran, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas perkebunan bagi kepentingan ekspor sekaligus menerobos lingkaran kemiskinan absolut tersebut.

Para transmigran yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia menempati 6 kesatuan pemukiman di Kecamatan Budong-Budong dengan jumlah 1.888 kepala keluarga (KK).

Dari jumlah kepala keluarga tersebut terdapat 3.090 tenaga kerja (buruh tani) pada perusahaan perkebunan yang bekerja dengan tingkat upah borongan yang relatif rendah. Dalam kaitannya inilah perlu dikaji relevansi antara keberadaan perkebunan kelapa sawit disatu pihak dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan buruh tani.

Keseluruhan rangkaian kegiatan dalam perkebunan kelapa sawit baras merupakan satu proyek yang terintegrasi secara sektoral dengan berbagai macam instansi pemerintah, antara lain Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Pertanian, Dinas Perkebunan dan pemerintah daerah setempat.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terbukanya kesempatan kerja lebih luas, maka melalui instansi teknis-teknis terkait dan kerja sama dengan pihak perusahaan inti diadakan program perluasan areal/lahan perkebunan, baik melalui secara konversi lahan maupun dengan cara pemanfaatan lahan pangan/pekarangan warga transmigran yang bermukim pada unit-unit permukiman di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju.

Pemanfaatan lahan pekarangan tersebut dimaksudkan untuk menambah pendapatan petani dengan nilai ekonomi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.

Secara konsepsional dukungan pemerintah dan kerja sama dengan perusahaan inti pada gilirannya akan memberikan wajah baru bagi warga transmigran melalui kegiatan pertanian terpadu dan berkesimbangan. Diharapkan bahwa dengan berperannya usaha perkebunan kelapa sawit ini, kelak akan membuka alam keterisolasian dengan meng-

optimalkan program-program pada sub sektor perkebunan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam hubungan inilah pula instansi teknis yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut mengupayakan suatu sentra-sentra pelayanan dan lembaga-lembaga yang dapat mengakomodikasi keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh buruh tani warga transmigran. Implikasinya diterapkan melalui pemanfaatan Unit Pelayanan Teknis (UPT), optimalisasi peran serta KUD, pembinaan kemampuan aparat penyeluruh perkebunan, serta menciptakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat menunjang kelancaran mekanisme perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan areal perkebunan yang baru diharapkan pula akan semakin menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan sasaran pokok meratakan pendapatan warga transmigran dan meningkatkan nilai tambah dan nilai guna atas pemanfaatan konversi lahan-lahan yang kosong, lahan yang terlantar, dan lahan yang kritis yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif.

Penafsiran akan pentingnya penyerapan tenaga kerja ini dapat dikaji dari konsepsi Sujito Wirosardjono (1998, hal. 24) yang menguraikan bahwa dengan adanya kelebihan tenaga kerja secara umum, disamping penyebaran tenaga kerja antara daerah-daerah yang kurang seimbang,

sementara daya serap ekonomi untuk penyaluran tenaga kerja tersebut masih kurang maka perlu ditingkatkan pembangunan.

Dikatakan bahwa tingkat pendayagunaan tenaga kerja di pedesaan adalah lebih dari 44% yang bekerja kurang dari yang sewajarnya, karena mereka rata-rata sebagai pekerja keluarga yang bekerja lebih pendek daripada sektor formal. Selanjutnya, meskipun terdapat kemungkinan penciptaan lapangan kerja baru, akan tetapi jika tidak diikuti dengan peningkatan dan pemerataan bukan saja tidak dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan, tetapi lebih jauh akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Bertitik tolak dari konsepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penciptaan lapangan kerja baru dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja, atau dalam arti kata permintaan tenaga kerja akan meningkat di pasaran kerja sehingga peluang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan semakin terbuka pula yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Meningkatnya pendapatan masyarakat akan memperluas kegiatan ekonomi sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Adalah sangat rasional jika keberadaan perkebunan kelapa sawit PTP. Surya Raya Lestari II diharapkan mampu membuka kesempatan kerja baru sekaligus

meratakan pendapatan di kalangan warga transmigran melalui proyek perkebunan yang padat karya dan penerapan teknologi yang tepat guna. Dengan demikian keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya dalam pembangunan akan semakin memperkokoh terwujudnya agribisnis dan agriindustri di bidang pertanian.

2.6 Pengertian Produksi dan Fungsi Produksi

Kata produksi sering digunakan sebagai istilah dalam membuat sesuatu dalam istilah yang lebih luas dan fundamental.

Banyak pendapat dari pakar yang mendefinisikan produksi antara lain Basu Swasta (1995 : 280) yang mengemukakan pengertian proses produksi adalah proses produksi atau kadang-kadang juga disebut proses pengubahan adalah suatu proses yang mengubah suatu bahan menjadi beberapa bentuk, perubahan bentuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan mesin, pengepresan dan sebagainya.

Kegiatan produksi akan melibatkan perubahan dan pengolahan berbagai macam input menjadi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen atau pemakaian jasa.

Dilihat dari sifat proses produksi maka segala kegiatan yang bersifat menghasilkan sesuai disebut proses produksi.

Proses pabrikasi ini nyata ditemukan pada usaha pabrik yang bersifat bahan baku maupun mengolah sendiri tersebut menjadi final yang akan dijual.

Menurut Bambang Banu Siswoyo (1996 : 20) mengemukakan bahwa fungsi produksi adalah kegiatan atau usaha yang dapat menghasilkan barang-barang baru.

Di dalam ilmu ekonomi penjelasan tentang fungsi produksi tersebut dapat dikemukakan oleh pendapat-pendapat dari berbagai ahli ekonomi antara lain oleh Lefwich yang dikutip oleh Sitohay (1990 : 140) memberikan fungsi produksi merupakan hubungan fisik antara input atau sumber daya untuk menghasilkan output atau barang dan jasa persatuan waktu dari suatu perusahaan.

Menurut Dominick Salvatore (1995 : 126) mengemukakan bahwa fungsi produksi (Production Function) untuk setiap komoditi adalah suatu persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan jumlah (maksimum) komoditi yang dapat diproduksi perunit waktu untuk setiap himpunan input alternatif bila menggunakan teknik produksi yang tersedia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju yang diteliti adalah, Peranan PTP. Surya Raya Lestari II Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Lokasi penelitian tersebut terletak 67 Km sebelah barat ibukota kabupaten. Batas-batas wilayah penelitian dapat diungkapkan dari peta geografis dimana PTP. Surya Raya Lestari II, sebelah Barat perbatasan desa Tikke, sebelah Timur perbatasan dengan hutan lindung PT. Hidup Baru, dan sebelah Selatan perbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Meskipun daerah penelitian tergolong sebagai daerah terpencil akan tetapi ditinjau dari konsep penwilayahan komoditas, maka Kecamatan Budong-Budong sangat potensial dengan macam ragam budidaya tanaman jangka panjang, khususnya kelapa sawit.

3.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan mengenai hal peristiwa atau gejala-gejala

yang berhubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit. Data primer ini dapat berupa laporan tahunan, data luas areal perkebunan, data tenaga kerja buruh tani dan sebagainya.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya berupa bahan-bahan tertulis atau dokumentasi lainnya lainnya yang dipandang dapat memberikan informasi yang akurat.

Adapun sumber data yang dipergunakan, adalah:

1. Data yang diperoleh dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Raya Lestari II.
2. Data yang diperoleh dari Dinas Perkebunan, Kantor Statistik, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju.

3.3 Peralatan dan Metode Analisa

Data yang terkumpul dianalisa dengan mempergunakan Analisa Regresi Sederhana. Analisa Regresi ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan, atau membuktikan diterima tidaknya hipotesis tersebut. Secara sederhana rumus Analisa Regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana : Y = Variabel yang dijelaskan atau dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja.

X = Variabel penjelasan atau dalam penelitian ini adalah PTP. Kelapa Sawit Surya Raya Lestari II.

a dan b = Koefisien regresi atau parameter yang ditaksir.

Untuk mencari nilai a dan b, rumusnya adalah :

$$a = \frac{\Sigma Y - b \Sigma X}{n}$$

$$b = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X \Sigma Y)}{n (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

3.4. Kerangka Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan kerangka operasional sebagai berikut :

- Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu perusahaan dimana penyerapan tenaga kerja tersebut mampu mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan taraf masyarakat.
- Tenaga kerja yang bekerja diperkebunan adalah tenaga kerja yang berasal dari tempat sekitar perusahaan baik itu pribumi atau pun pendatang yang bertransmigrasi ke tempat itu.

- Total tenaga kerja adalah semua tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, baik itu yang digaji (bulanan) maupun di upah (harian dan mingguan).
- Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (biasanya/jam/orang).



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju merupakan salah satu diantara 23 Kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan. Mamuju terletak 475 Km sebelah Selatan ibukota propinsi, dengan luas wilayah 11.057,81 Km², dan mencakup 6 kecamatan.

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah (1998), luas Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju meliputi:

- Kecamatan Tappalang dengan luas = 131,25 Km²
- Kecamatan Mamuju dengan luas = 260,93 Km²
- Kecamatan Kalukku dengan luas = 875,00 Km²
- Kecamatan Kalumpang dengan luas = 3.196,88 Km²
- Kecamatan Budong-Budong dengan luas = 3.050,00 Km²
- Kecamatan Pasangkayu dengan luas = 3.043,75 Km²

Iklim di wilayah ini merupakan iklim tropis yang menurut Smith Ferguson (1980) termasuk tipe A. Temperatur dan kelembaban tanah pada umumnya konstan. Permukaan tanah dan atau berbukit-bukit dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm per tahun.

Dengan curah hujan yang merata setiap tahun menyebabkan kondisi tanah menjadi subur yang memungkinkan

tumbuhnya berbagai jenis tanaman jangka panjang. Pada umumnya jenis tanah di Kabupaten Mamuju termasuk dalam jenis Alluvial.

4.2 Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1995 jumlah penduduk Kabupaten Mamuju 237.314 jiwa yang terbesar pada 6 Kecamatan, yakni : Kecamatan Tapalang, Mamuju, Kalukku, Kalumpang, Budong-Budong dan Pasangkayu.



TABEL 1

PENDUDUK KABUPATEN MAMUJU HASIL SENSUS PENDUDUK
TAHUN 1995 DAN PERKIRAAN DIRINCI PERKELOMPOK
UMUR SAMPAI TAHUN 2000

Kelompok Umur	1995	1996	1997	1998	1999	2000
0 - 4	26.864	28.461	28.987	31.946	33.845	35.857
5 - 9	27.369	26.996	30.720	32.546	34.481	36.531
10 - 14	21.608	22.893	24.254	25.696	27.224	28.842
15 - 19	17.664	18.714	19.827	21.006	22.255	23.578
20 - 24	15.964	16.913	17.918	18.993	20.111	21.307
25 - 29	15.867	16.810	17.809	18.868	19.990	21.178
30 - 34	13.860	14.684	15.557	16.482	17.462	18.500
35 - 39	11.020	11.675	12.368	13.104	13.883	14.708
40 - 44	8.721	9.239	9.788	10.370	10.986	11.639
45 - 49	6.166	6.533	6.921	7.332	7.768	8.230
50 - 54	4.533	4.803	5.089	5.392	5.713	6.053
55 - 59	2.736	2.889	3.071	3.254	3.447	3.652
60 - 64	2.239	2.372	2.513	2.662	2.820	2.988
65 keatas	3.165	3.374	3.575	3.787	4.012	4.251
J u m l a h	177.796	188.366	198.398	211.428	233.997	237.314

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Mamuju Tahun (1995-2000 angka sementara)

Berdasarkan tabel tersebut di atas tepatnya jika dilihat dari potensi sumber daya manusia, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju memiliki potensi usia kerja produktif yang apabila dibina dan dikerahkan dengan baik, akan merupakan modal utama pembangunan.

Dalam hubungan ini klasifikasi usia produktif yang diharapkan dapat menjadi angkatan kerja terdapat pada kelompok antara 20 - 49 tahun. Angkatan kerja tersebut merupakan kelompok-kelompok penduduk yang apabila ditinjau dari segi pasaran kerja merupakan angkatan kerja yang paling dominan.

Kelompok angkatan kerja yang tergolong kurang produktif berada pada usia antara 50 - 60 tahun ke atas. Ditinjau dari efisien kelompok usia dalam kerja yang dimaksudkan ini merupakan angkatan kerja yang karena berbagai keterbatasan fisik kurang diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Data tersebut di atas menggambarkan pula, bahwa jumlah usia produktif penduduk yang dianggap dapat bekerja merupakan angkatan kerja potensial yang sangat perlu dibina dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan program-program pokok pemerintah yang disektor pembangunan pertanian, khususnya agroindustri yang padat karya atau dengan kata lain jumlah penduduk pada usia produktif ini merupakan modal dasar yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan sektor pertanian.

Penafsiran akan hal tersebut dapat dikaji dari konsepsi Michael P. Todaro (1983, hal. 224-227) yang mengemukakan bahwa modal utama dalam pembangunan terletak pada aspek sumber daya manusia. Manusia merupakan faktor-faktor produksi yang aktif yang dapat mendirikan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan modal dan faktor produksi alam merupakan sumber-sumber pasif.

4.3 Keadaan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Mamuju

Pengelolaan sub sektor perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju dilaksanakan sentra perwilayahan komoditas (SPPK), yang meliputi:

- Komoditas kelapa di Kecamatan Kalukku, Tapalang, Mamuju dan Budong-Budong.
- Komoditas kakao di Kecamatan Kalukku, Tapalang, Budong-Budong dan Pasangkayu.
- Komoditas kelapa sawit di Kecamatan Pasangkayu dan Budong-Budong.
- Komoditas karet di Kecamatan Budong-Budong.
- Komoditas cengkeh di Kecamatan Mamuju dan Tapalang.
- Komoditas pala di Kecamatan Mamuju dan Tapalang.
- Komoditas abaca/rami di Kecamatan Kalukku.

Perwilayahan komoditas itu disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim dan keadaan tanah pada masing-masing wilayah dan alternatif pengembangannya.

Pada tiap-tiap wilayah pengembangan komoditi, diupayakan untuk dikembangkan pola usaha tani perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, pola UPP dan pola PIR sesuai dengan dan potensi setempat dengan harapan bahwa sub sektor perkebunan akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan kebijakan pengembangan perwilayahan komoditi itulah ditetapkan dua tujuan pokok yaitu:

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas hasil perkebunan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja, mendorong tumbuhnya industri di pedesaan, menunjang kegiatan produktifitas, perbaikan mutu hasil, peningkatan peranan kelembagaan, dan perbaikan pemasaran hasil.
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber lahan, iklim dan sumber daya manusia, serta menjaga kelestarian sumber daya manusia, serta menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penerapan hasil teknologi terutama pada lahan terlantar dan kering.

Implimentasi dari kebijakan tersebut dilaksanakan dengan langkah-langkah:

1. Mendorong dan mengembangkan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan pola Unit Pelaksanaan Pengembangan (UPP) di daerah. Memanfaatkan lahan baru dan lahan kosong serta lahan kering, lahan terlantar dan pola perkebunan rakyat dengan sasaran luas areal yang disesuaikan dengan kondisi lahan.

2. Meningkatkan dan mendorong peran serta dan swadaya petani dan pengusaha untuk melakukan usaha diversifikasi, rehabilitasi dan perluasan areal.
3. Meningkatkan usaha perbaikan sistem pengolahan dan pemasaran hasil, agar petani merasakan dampak nilai dan kemudahan melalui pusat-pusat.
4. Mengembangkan jaringan informasi antara kelompok tani, DPP, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan balai penelitian.
5. Meningkatkan pola produksi sesuai dengan permintaan pasar yang didukung oleh tersedianya modal dan prosedur kerja yang sederhana dan cepal serta sistem pengangkutan secara teratur.
6. Meningkatkan kemampuan dan daya dukung lahan sehingga kemampuan kelestarian sumber daya alam dapat terpelihara.

Sebagai gambaran umum tentang keadaan sub sektor perkebunan di Kabupaten Mamuju, maka berikut ini akan disajikan beberapa tabel yang memuat tentang keadaan, luas areal, angkatan kerja dan jenis komoditi perkebunan yang diusahakan, baik oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar swasta.

TABEL 2

PERKEMBANGAN LUAS AREAL KOMODITI PERKEBUNAN
KABUPATEN MAMUJU (1995/1996-1999/2000)

Komoditi	Luas Areal (Ha)					Kenaikan Rata-rata (%)
	Tahun 95/96	Tahun 96/97	Tahun 97/98	Tahun 98/99	Tahun 99/00	
A. Perkebunan Rakyat						
- Kakao	7.715	7.965	15.358	15.752	16.752	26,25
- Kelapa Dalam	11.306	11.624	11.582	11.822	11.822	1,31
- Kelapa Hibrida	1.201	1.304	1.383	1.383	1.480	1,31
- Cengkeh	859	859	829	829	820	5,41
- Kopi	1.355	1.355	1.357	1.399	1.409	0,99
- Kemiri	399	399	540	540	550	9,30
- Tanaman Lain	62	62	122	125	136	25,22
Jumlah (A)	22.897	23.568	31.171	31.750	32.963	10,22
B. Perkebunan Besar Swasta (PBS)						
- Kelapa Sawit	2.339	6.668	11.862	26.568	31.068	100,9
- Kakao	627	827	827	837	1.067	14,0
- Kelapa Dalam	857	892	892	892	900	1,2
- Karet	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-
Jumlah (A + B)	28.520	33.755	46.552	61.842	67.758	24,6

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 1999/2000

Data tersebut mengungkapkan bahwa perkebunan luas areal perkebunan dari tahun 1995/1996 yang hanya 28.250 Ha meningkat menjadi 67.758 Ha. Pada tahun 1999/2000 atau rata-rata peningkatan per tahun adalah 24,67%. Luas areal perkebunan rakyat juga mengalami peningkatan, yakni dari 22,897 Ha, pada tahun 1995/1996 menjadi 32,963 Ha, pada tahun 1999/2000 rata-rata persentase meningkat itu berkisar 10,22% per tahun.

Areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) meningkat dari 5.623 Ha pada tahun 1995/1996 menjadi 34.795 Ha, pada tahun 1999/2000, atau kenaikan itu mencapai rata-rata 60,68% per tahun. Adapun Perkebunan Besar Negara (PBN) yang komoditinya adalah karet dengan wilayah pengembangan Kecamatan Budong-Budong seluas 1.800 Ha, pada awalnya dikelola oleh perusahaan negara PT. Perkebunan XVII (PTP), akan tetapi karena BUMN ini dianggap gagal, maka diambil oleh PT. Surya Raya Lestari II (anak perusahaan dari Astra Group).

Produksi kelapa sawit di Kabupaten Mamuju khususnya pada PTP Surya Raya Lestari II dari tahun 1994/1995 - 1999/2000 menunjukkan adanya suatu peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

TABEL 3

PRODUKSI KELAPA SAWIT PTP SURYA RAYA LESTARI II
DI KABUPATEN MAMUJU (1995/1996-1999/2000)

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Juml. Produksi (Ton)	Perkembangan (%)
1995	665,13	870	-
1996	1.674,20	1.300	49,43
1997	3.612,83	1.970	51,54
1998	3.730,61	2.700	37,06
1999	5.981,71	3.500	29,63

Sumber: Kantor PTP Surya Raya Lestari II

Dari data tersebut di atas, nampak adanya kenaikan produksi kelapa sawit dari tahun 1994/1995 - 1999/2000 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diharapkan hal ini bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Data tersebut menjelaskan perkembangan komoditi perkebunan setiap tahun di Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

- Kenaikan produksi dari tahun 1995/1996, 870 ton menjadi 1.500 ton (tahun 1999/2000) menunjukkan kenaikan rata-rata 41,92% per tahun.

- Produksi perkebunan rakyat mengalami perkembangan dari 15.867 ton 1995/1996 menjadi 23.469 ton (tahun 1999/2000). Kenaikan itu berkisar 10,57% per tahun.
- Produksi perkebunan besar swasta pada komoditi kakao, persentase kenaikannya 154,17% per tahun. Kenaikan dalam jumlah yang besar ini, antara lain disebabkan oleh kenaikan tingkat harga kakao di pasaran serta meningkatnya pula permintaan pasar.
- Sedangkan untuk perkebunan rakyat, produksi kakao kenaikannya berkisar 30,61% per tahun, yakni 4.446 ton (tahun 1995/1996) menjadi 11.543 ton (tahun 1999/2000).
- Produksi komoditi kelapa dalam juga mengalami perkembangan dari 10,638 pada tahun 1995/1996 naik menjadi 10,556 pada tahun 1999/2000. Presentase kenaikannya berkisar 42,15% per tahun. Kenaikan produksi ini pada umumnya disebabkan oleh kenaikan indeks konsumsi kelapa dan permintaan pasar dalam negeri.

TABEL 4

LUAS AREAL DAN PRODUKSI PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS)
DI KABUPATEN MAMUJU 1999 - 2000

No.	Nama PRS	Komo- diti	Keadaan Tanaman				(Ton)	Jumlah Petani :
			TBM	TM	TIK	Jumlah		
1.	PT. Surya Ra- ya Lestari*	K.Sawit	3.329,3	5.952,2	-	9.281,5	26.753	2.389
2.	PT. Unggul MIL**	K.Sawit	8.595,7	-	-	8.595,7	-	3.461
		Karet	600	1.200	-	1.800	-	-
3.	PT. Letawa**	K.Sawit	6.884	716	-	7.600	3.228	-
4.	PT. Menuang**	K.Sawit	2.500	-	-	2.500	-	-
5.	PT. Pasang- kayu**	K.Sawit	3.024	-	-	3.024	-	-
6.	PT. Perkala	Kelapa	-	93,5	-	93,5	38	-
7.	PT. Hidup Baru	Kelapa	15	38,5	8,5	62	38	-
8.	PT. Lariang	Kelapa	500	116	-	616	-	-
		Kakao	200	-	-	200	-	-
9.	PT. Babia	K. Dalam	-	21	-	21	17	-
10.	PT. Agri Baras	Kakao	-	600	-	600	540	-
11.	PT. Tabao Jaya	Kelapa	-	100	-	100	80	-
12.	PT. Puskopad DAM VII Wirabuana	Kakao	-	27	-	27	27	-
T o t a l			25.648,1	8.864,2	8,5	34.520,7	30.871	5.850

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, 1999

*) Pola Pir (Perkebunan Inti Rakyat)

***) Perkebunan Besar Swasta

Tabel ini menggambarkan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), baru mencapai 30.871 ton (tahun 1995/1996) diantaranya 26.753 ton dihasilkan oleh PTP. Surya Raya Lestari II, dengan menggunakan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 3.228 ton dihasilkan oleh PT. Letawa dan sisanya oleh 12 perusahaan perkebunan dengan tingkat produktivitas yang berbeda-beda.

Data ini mengungkapkan bahwa kapasitas luas areal tanaman produksi perkebunan belum mencapai target optimal disebabkan oleh faktor keadaan tanaman (khususnya TIR) yang menunjukkan kondisi yang relatif rendah. Dalam hubungan inilah kebijaksanaan pokok pemerintah Kabupaten Mamuju akan mengusahakan suatu tindakan operasional berupa pemanfaatan lahan yang dapat dikonversi.

Konversi lahan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan lahan-lahan yang terlantar, lahan kritis atau lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang menghasilkan komoditas unggulan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas. Dari pemanfaatan konversi ini diharapkan adanya peningkatan nilai tambah sub sektor perkebunan sambil tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga keseimbangan ekologis tetap terjamin dan kesuburan tanah tetap dalam kondisi yang produktif.

TABEL 5

PEMANFAATAN LAHAN YANG DAPAT Dikonversi DI KABUPATEN
MAMUJU TAHUN 1995/1996 - 1999/2000

No.	Kecamatan	luas Lahan Yang Dapat Dikonversi	Pemanfaatan Tahun 1999/2000				Sisa (Ha)
			Tanaman Perbunan (Ha)	Trans. Umum (Ha)	Peru- mahan (Ha)	Lain- Lain (Ha)	
1.	Tapalang	3.720	3.720	-	-	-	-
2.	Mamuju	4.029	4.029	-	-	-	-
3.	Kalukku	27.556	10.399	4.145	-	4.342	8.670
4.	Pasang Kayu	54.556	8.642	2.637	2.250	6.644	33.673
5.	Rudong-Rudong	99.128	39.276	-	1.800	12.190	45.862
6.	Kaluppang	13.700	1.244	1.200	-	1.685	9.571
		202.161	67.492	7.982	4.050	24.861	97.776

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 1999/2000

Sejalan dengan kebijakan konversi lahan pertanian dan penerapan teknologi pasca panen, maka kebijaksanaan pemerintah daerah dalam pelestarian daya alam dan perlindungan ekologis ditekankan pula legalitas perusahaan perkebunan berupa keharusan untuk memiliki Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan dapat merusak lingkungan hidup. Meskipun pemanfaatan sumber-sumber secara optimal menjadi sangat urgen dalam setiap pengelolaan sektor-sektor pembangunan, tetapi faktor daya dukung lingkungan

harus memiliki kaitan erat dan prioritas utama dalam setiap kegiatan yang bersifat eksploratif terutama dalam kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) tahun 1995 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan perkebunan yang memperhatikan aspek lingkungan biotik, lingkungan biosfir, lingkungan sosio-ekonomis setempat sehingga kebijaksanaan pemerintah daerah dalam membuka/mengembangkan areal pertanahan akan tetap berpedoman pada studi lingkungan hidup.

Hak Penguasaan Hutan (HPH) ini pada prinsipnya berhubungan erat dengan program pemerintahan di bidang transmigrasi. Mengingat banyak pengusaha yang sering kali melakukan eksplorasi hutan dengan mengatas namakan transmigran sehingga perlindungan pelestarian lingkungan hidup mencakup pula izin Hak Penguasa Hutan (HPH). Bagi perusahaan perkebunan besar swasta, khususnya yang memiliki berbagai kantor cabang yang terbesar di pelosok tanah air, izin HPH ini merupakan persyaratan utama dalam melaksanakan eksplorasi.

Dalam hubungan inilah program-program pokok pembangunan proyek pembangunan pada Pelita VI mendatang ditetapkan secara koordinatif antar departemen, dimana sub sektor perkebunan mencakup lima program pokok, yakni:

1. Program peningkatan produksi perkebunan.
2. Program pengembangan penyuluhan perkebunan.
3. Program penyempurnaan dan pengembangan statistik.
4. Program penyempurnaan efesiensi aparatatur dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan.
5. Program peningkatan mutu hasil tanaman perkebunan.

Untuk mencapai sasaran kebijaksanaan program-program tersebut, maka ditetapkan proyek-proyek sasaran kegiatan yang diprioritaskan untuk sub sektor perkebunan yang meliputi:

1. Upaya ekstensifikasi.
2. Upaya intensifikasi.
3. Rehabilitasi dan diversifikasi.
4. Perbaikan mutu hasil tanaman perkebunan.
5. Perbaikan PPL, kelompok tani dan petani serta penyuluh perkebunan.
6. Penyempurnaan statistik sub sektor perkebunan.

TABEL 6

LUAS DAN LOKASI KEGIATAN PEMEGANG HPH
DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 1998/1999

No.	Pemegang HPH	Luas (Ha)	Lokasi Kecamatan
1.	PT. Intan Permata	47.000	Kalukku, Budong-Budong dan Kalumpang
2.	PT. Para Kawan	55.000	Pasangkayu
3.	PT. Sulwood	110.000	Pasangkayu dan Budong- Budong
4.	PT. Hayam Wuruk	64.000	Budong-Budong
5.	PT. Palapi Timber	64.000	Kalukku, Mamuju dan Tappalang
6.	PT. Rante Mario	114.000	Budong-Budong
7.	Sampaga Utama Sakti	44.000	Kalumpang

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju 1998/1999

TABEL 7

LUAS KAWASAN HUTAN MENURUT FUNGSINYA PER KECAMATAN
DI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 1998/1999
(DALAM HEKTAR)

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Suaka Alam	Hutan Prod. Telap	Hutan Prod. Yg Dapat di konversi	Jumlah Luas
1.	Tapalang	26.827	6.877	-	-	-	38.704
2.	Mamuju	8.723	2.813	-	-	-	11.536
3.	Kalukku	4.752	20.457	-	-	23.531	48.740
4.	Kalumpang	234.437	60.657	-	10.313	-	305.407
5.	Budong-Budong	96.354	80.623	-	40.937	13.376	231.290
6.	Pasangayu	134.063	24.188	-	-	60.869	219.120
	Jumlah 1993	505.156	195.615	-	51.250	97.876	849.777
	1992	505.156	51.250	-	195.615	97.776	849.797

Sumber: Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Tahun 1998/1999

Bertitik tolak dari data kuantitatif yang menggambarkan keadaan umum sub sektor perkebunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju dapat disimpulkan bahwa terdapat empat permasalahan pokok yang perlu ditangani secara konsekuen dalam pengelolaan sub sektor perkebunan. Keempat permasalahan yang dimaksudkan itu, adalah:

(1) Masalah Produksi dan Kultur Teknis

Masalah ini berhubungan dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang antara lain disebabkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam memproduksi terutama dalam penerapan teknologi pertanian modern. Faktor lahan usaha tani yang relatif sempit (rata-rata 0,90 ha per kepala keluarga), dimana di dalamnya terdapat lahan kosong dan lahan terlantar yang belum dimanfaatkan.

Faktor kekurangan modal menyebabkan petani kurang responsive terhadap inovasi teknologi pertanian. Keterbatasan pilihan petani bukan saja dalam keterkaitan ekonomis, tetapi juga perilaku sosialnya yang cenderung kurang adaptif terhadap setiap gejala perubahan dalam teknologi produksi. Kondisi ini membawa pengaruh berupa ketimpangan produktivitas, ketimpang kualitas, dan ketimpangan dalam berorientasi terhadap permintaan pasar.

(2) Masalah Kualitas Produksi

Rendahnya kualitas produksi pada hakekatnya merupakan akibat dari berbagai faktor. Diantaranya adalah penerapan teknologi pasca panen yang tidak efisien sehingga standarisasi mutu produksi kurang memenuhi persyaratan kualitas. Dalam kondisi seperti ini petani diperhadapkan pada suatu dilema, yakni apabila hasil

produksi tidak dipasarkan dalam waktu yang singkat maka kemungkinan hasil produksi tersebut akan rusak oleh pengaruh cuaca, musim dan sebagainya. Sebaliknya jika hasil produksi itu terjual dalam waktu yang relatif singkat, maka standar harga menjadi sangat rendah sebagai akibat dari faktor kualitas disamping berlimpahnya produksi di pasaran mengakibatkan harga cenderung anjlot.

(3) Masalah Kelembagaan

Masalah ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga pelayanan seperti Koperasi Unit Desa (KUD), lembaga-lembaga penyuluh seperti BPP dan sentra-sentra pelayanan lainnya. Tidak efisiennya koordinasi lintas sektoral antara instansi teknik yang terkait menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam produksi. Dengan demikian kemandirian lembaga-lembaga yang dipandang dapat mengakomodasikan permasalahan petani, tampaknya kurang responsif terhadap permasalahan yang dirasakan oleh petani pada umumnya.

(4) Masalah Pemasaran Hasil

Faktor utama yang menjadi sumber kesulitan petani dalam memasarkan hasil-hasil produksinya adalah masih banyaknya daerah yang terisolir atau belum terjangkau oleh sarana angkutan roda empat. Prasarana penghubung yang tidak memadai ini lazimnya berpengaruh terhadap

peningkatan biaya angkutan yang menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menerobos pasaran.

Fluktuasi harga yang tidak stabil terhadap berbagai komoditas, juga merupakan salah satu penyebab rendahnya standar harga di pasaran. Oleh sebab itu, nilai tambah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani tampaknya sulit direalisasikan.

Upaya intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian belum dapat diaksentuasikan dengan motivasi para petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pengertian bahwa kelemahan dalam aspek pemasaran menyebabkan standar hidup petani hampir dikatakan tetap konstan.

Akibat dari kondisi tersebut adalah sering kali banyak program pertanian mengalami hambatan karena petani secara ekonomis tidak dapat merasakan efek pembangunan pertanian secara konstruktif dan partisipatif, atau kurang terjamin kesinambungan produksinya.

4.4 Beberapa Kebijakan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Mamuju

Pembangunan sektor pertanian pada pelita VI mendatang, terasa sangat penting artinya karena mengingat minyak bumi belum dapat diandalkan dalam jangka waktu singkat sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.

Untuk itu pembangunan sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan perlu diarahkan pada peningkatan volume, dan kualitas produksi melalui upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi serta usaha rehabilitas yang dapat mendorong tumbuhnya agroindustri dan agrobisnis.

Pertumbuhan agroindustri dan agrobisnis ini diharapkan dapat menunjang peningkatan ekspor melalui penyediaan bahan baku yang pada gilirannya dapat memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani dan pendapatan daerah. Dalam hubungan inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menetapkan empat kebijaksanaan pokok pada sub sektor perkebunan, yakni:

1. Kebijakan Pengembangan Produksi

Kebijakan pengembangan produksi ini diupayakan melalui program-program:

- a. Pengembangan lanjutan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan melibatkan petani yang berlahan sempit, buruh tani dan petani berpindah-pindah menjadi anggota peserta FIR dan UPP.
- b. Pengadaan benih atau bibit unggul yang digunakan secara meluas dan merata.
- c. Penerapan hasil teknologi yang maju melalui kerja sama antara kelompok tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Balai Penelitian.

- d. Proteksi tanaman dari serangan hama dan penyakit dilakukan secara terpadu dan terkoordinir untuk menjaga kemampuan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi serta perluasan areal sesuai dengan pola pengwilayahan komoditas.
- f. Menentukan pusat-pusat pelayanan pengembangan komoditi.

2. Kebijakan Peningkatan Produksi

Peningkatan kualitas/mutu produksi dilakukan melalui program-program:

- a. Penggunaan bibit yang bermutu tinggi secara meluas dan merata di kalangan petani.
- b. Penyediaan introduksi alat-alat pengolahan produksi yang tepat guna untuk memperoleh nilai tambah dan sekaligus meningkatkan mutu permintaan pasar.
- c. Tersedianya bahan informasi secara teratur tentang kualitas/standar mutu, terutama untuk komoditi ekspor.
- d. Mendorong kerja sama antar asosiasi swasta, Koperasi Unit Desa (KUD) dengan kelompok tani dalam hal pengolahan hasil-hasil perkebunan.

3. Kebijakan Peningkatan Pemasaran

Peningkatan pemasaran hasil dilakukan melalui program-program:

- a. Menciptakan iklim berusaha yang favorable dalam rangka mendorong kelancaran pemasaran.
- b. Pembinaan dan pengembangan standar mutu kearah yang lebih baik sesuai dengan permintaan pasar.
- c. Pemanntapan pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi secara meluas dan merata dengan memenuhi prosedur yang telah berlaku, baik di kalangan koperasi, swasta, maupun di kalangan instansi pemerintah yang terkait.
- d. Dukungan prasarana jalan dan jaringan perhubungan yang memadai untuk memperlancar pengangkutan.
- e. Dukungan pengangkutan dari instansi pelayanan berupa diterapkannya jadwal kunjungan kapal secara tetap dan teratur.

4. Kebijakan Peningkatan Peranan Pembangunan

Untuk meningkatkan peranan kelembagaan, maka diupayakan suatu program yang terprehensip yang mencakup:

- a. Mendorong pembentukan dan pembinaan KUD melalui pola PIR, UPP dan pola swadaya.

- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
- c. Pengembangan jaringan informasi secara teratur antara kelompok tani, PPL, dan Balai Penelitian.

TABEL 8

SASARAN PROGRAM/PROYEK SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DI KABUPATEN MAMUJU DALAM VI (SELAMA 5 TAHUN)

No.	Rencana Prog/Proyek	Lokasi Per Kecamatan
I	<u>EKSTENSIFIKASI</u>	
	- Kakao	2.000 Ha Kalukku, Budong-budong, Pasangkayu
	- Kelapa Sawit	500 Ha Pasangkayu dan Budong-budong
	- Kopi Arabika - Kemiri	500 Ha Kalumpang 500 Ha Kalukku, Tappalang, Mamuju dan Kalumpang
II	<u>INTENSIFIKASI</u>	
	- Kakao	1.000 Ha Kalukku, Budong-budong dan Pasangkayu
	- Kelapa	1.000 Ha Pasangkayu, Kalukku, Tappalang dan Budong-budong
	- K o p i - Cengkeh	500 Ha Kalumpang 500 Ha Mamuju, Tappalang dan Pasangkayu
III	<u>REHABILITASI</u>	
	- Kakao	500 Ha Kalukku, Tappalang dan Pasangkayu
	- Kelapa Dalam - K o p i	500 Ha Pasangkayu dan Tappalang 250 Ha Pasangkayu dan Kalumpang
IV	<u>DEVERSIFIKASI</u>	
	- Kelapa dan Kakao	500 Ha Kalukku, Tappalang, Budong-budong dan Pasangkayu
	- Cengkeh dan Lada - Cengkeh dan Vanili	500 Ha Mamuju dan Tappalang 200 Ha Mamuju dan Tappalang

No.	Rencana Prog/Proyek	Lokasi Per Kecamatan
V	<p><u>PERBAIKAN MUTU HASIL TANAMAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kakao - Kelapa <p><u>PENYULUHAN PER-KEBUNAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan PPL, Kelompok Tani dan Petani, Penyuluh Tenaga PPL. <p><u>PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK SUB SEKTOR KEBUNAN (6 BUAH)</u></p>	<p>500 Ha Kalukku, Pasangkayu, Tappalang dan Budong-budong</p> <p>500 Ha Tappalang, Pasangkayu dan Kalullu</p> <p>6 buah Kecamatan dan 50 buah desa/Kelurahan</p> <p>Kecamatan: Mamuju, Tapalang, Kalukku, Budong-budong, Pasangkayu dan Kalumpang</p>

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Tahun 2000



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Tinjauan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PTP. Surya Lestari II

Perkebunan Kelapa Sawit Lestari II di Budong-budong ini pada hakekatnya adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program transmigrasi. PIR ini dikelola oleh PTP. Surya Raya Lestari II sebagai perusahaan inti. Pelaksanaan pola PIR sesungguhnya merupakan penggabungan antara perkebunan besar sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma yang sasaran utamanya adalah pembukaan wilayah baru dan terisolir, pembuatan unit-unit pemukiman, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan produksi perkebunan.

PIR trans PKS Surya Lestari II terletak di Budong-Budong Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Sulawesi Selatan, 67 Km sebelah Timur Kota Kecamatan dan 180 Km sebelah Barat kota Kabupaten atau 509 Km sebelah Barat Kota Propinsi.

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) ini pada prinsipnya mengutamakan warga transmigrasi sebagai tenaga kerja utama di atas lahan eks hutan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sulwood, dengan area seluas 5.775 Ha (Tahun 1989).

Kegiatan perkebunan ini telah melibatkan warga atau peserta transmigran sebanyak 1.888 kepala keluarga pada enam satuan pemukiman. Penyelenggaraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) trans Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) dilakukan dengan pendekatan terhadap petani dan keluarganya.

Tujuannya adalah meningkatkan produksi, memperluas areal perkebunan, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kerja, serta peningkatan ekspor dan devisa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditempuh berbagai pola, diantaranya adalah pola PIR, pola UPP, pola Parsial dan pola Perkebunan Besar Swasta. Realisasi kebun yang telah dibangun hingga tahun 1995/1996 telah mencapai 5.774 Ha dengan rincian untuk perkebunan inti dan plasma dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 9
PERKEMBANGAN REALISASI KEBUN INTI
DAN PLASMA TAHUN 1995/1996

No.	Komponen	Uraian kegiatan	Luas (Ha)	Keterangan
I	INTI	TMB 0	264	-
		TMB 1	1.009	-
		TMB 2	304	-
		TMB 3	912	-
			2.225	
II	PLASMA	TMB 0	752	-
		TMB 1	2.438	-
		TMB 2	545	-
		TMB 3	486	-
			5.744	
III	TOTAL		5.744	

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju

Dengan bertitik tolak pada sasaran utama tenaga kerja yang mengelolah perkebunan ini, maka prinsipnya warga transmigrasi sebagai tenaga kerja utama dalam Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) diprioritaskan suatu lokasi penempatan dengan mempersiapkan fasilitas rumah petani, lahan pangan dan pekarangan serta fasilitas umum lainnya oleh Departemen Transmigrasi dan perambah hutan, yang pelaksanaannya dikontrakkan pada PTP. Surya Raya Lestari II. Perkembangan penempatan warga transmigrasi ini tergantung pada sejauh mana tersedianya fasilitas tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 10

REALISASI PENEMPATAN WARGA TRANSMIGRASI PTP. SURYA RAYA LESTARI II TAHUN 1995/1996

No. SP	Rumah (Unit)		Penempatan			KET.
	Target	Realisasi	KK	Jiwa	A. Kerja	
SP. I	325	325	325	1.216	704	
SP. II	325	325	325	1.284	655	
SP. III	449	449	449	1.634	679	
SP. IV	500	500	350	1.542	577	
SP. V	250	15	-	-	-	
SP. VI	500	500	439	1.940	850	
Jumlah	2.349	2.114	1.888	7.616	3.465	

Pembagian lahan pangan dan pekarangan bagi petani transmigrasi ini dimaksudkan untuk menyangga kebutuhan petani sebelum lahan plasma dibagikan khususnya setelah pembagian jaminan hidup selesai selama 1 tahun.

Setiap petani transmigrasi memperoleh pembagian lahan pangan 0,30 Ha, lahan pekarangan 0,20 Ha, dan pada umumnya telah ditanami tanaman semusim dan tanaman tahunan, seperti: jagung, kedelai, kacang tanah, ubi-ubian, pisang, pepaya, dan sedikit kakao dan kelapa hybrida. Atas dasar itulah penempatan petani transmigran pada jenis lahan diklasifikasikan menurut jenis dan karakteristik kesuburan lahan yang dikelola/dihuninya.

Pada lahan SP. 1 dan SP. 2, produksi tanaman pangan dianggap cukup baik, bahkan beberapa komoditi dapat memberikan nilai ekonomis yang dapat dipasarkan, misalnya pisang, pepaya, kacang kedelai, jagung dan ubi jalar. Pada SP. 3, SP. 4 dan SP. 6 merupakan lokasi transmigran yang kurang subur sehingga tanaman musim tampaknya kurang memberikan hasil yang memuaskan. Dalam hubungan inilahantisipasi tanaman kakao dan kelapa hybrida dipandang sangat baik melalui sistem pertanaman lorong, dan pada umumnya diminati oleh petani.

Setelah penempatan transmigrasi sudah rampung maka diadakanlah koordinasi diantara instansi terkait dan yang

secara teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, sehingga jalinan kerja sama yang rapi dengan pihak perusahaan inti dapat mengantisipasi berbagai masalah, khususnya masalah pembinaan teknis dan operasional dalam penyelenggaraan di lokasi perkebunan.

TABEL 11

REALISASI PERKEMBANGAN PERSONIL APARAT PEMERINTAH
YANG BERTUGAS DI WILAYAH PIR PKS
BUDONG-DUDONG 1998/1999

No.	Nama Instansi Teknis Terkait	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan	35 orang	Untuk 6 UPT Untuk 5 UPT
2.	Dinas Kesehatan	5 orang	Untuk 3 orang
3.	Aparat Keamanan	5 orang	Tentara dan 3 orang polisi
4.	Dinas Perkebunan	2 orang	1 ADO dan satu Cabang Dinas Perkebunan Untuk 5 UPT
5.	PPI Rimas	5 orang	Sewaktu-waktu
6.	Departemen Tenaga Kerja	Tim	Sewaktu-waktu
7.	Badan Pertahanan	Tim	Untuk 5 UPT
8.	Departemen Dikbud	25 orang	
9.	Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil	Tim	Sewaktu-waktu

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju 1998/1999

Salah satu tujuan diadakannya koordinasi lintas sektoral antar instansi pemerintah adalah untuk mencapai dukungan yang kuat antara sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya dalam pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Oleh sebab itulah, pemanfaatan lahan pangan/pekarangan sangat berguna dalam menyangga kebutuhan pokok petani transmigran, terutama budidaya tanamanumpang sari dan hortikultura.

TABEL 12

REALISASI PEMANFAATAN LAHAN PANGAN DAN PEKARANGAN
PETANI TRANSMIGRAN TAHUN 1998/1999

No.	Jenis Komoditi	Harga/Satuan	Lokasi Bergembang
1.	Kacang Tanah	Rp. 800/Kg	SP.1, SP.2 SP.3
2.	Kedelai	Rp. 600/Kg	SP.1, dan SP. 2
3.	Jagung	- *	Semua Lokasi
4.	Ubi Jalar	- *	Semua Lokasi
5.	Ubi Kayu	- *	Semua Lokasi
6.	Pisang	- *	Semua Lokasi
7.	Pepaya	- *	Semua Lokasi
8.	Telur	Rp. 250/Dutir	Semua Lokasi
9.	Ayam Buras	Rp. 5.000/Kg	Semua Lokasi
10.	K a k a o	Rp. 800/Kg	SP.1 dan SP.2

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju 1999.

*) Tidak ada standar kerja

Pemanfaatan lahan pekarangan juga merupakan salah satu tindakan menjaga konservasi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah.

5.2 Saranan dan Prasarana Pendukung Perkebunan Inti Rakyat (PIR) PTP. Surya Raya Lestari II

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perkebunan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang diharapkan dapat memperlancar proses pengolahan perkebunan PIP. Surya Raya Lestari II.



TABEL 13

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
PIR PTP SURYA RAYA LESTARI
TAHUN 1998/1999

No.	Uraian Sarana & Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Jalan Desa	150	Km	Rampung
2.	Gorong-gorong Jalan Desa	350	Km	Rampung
3.	Jalan Penghubung	65	Km	Rampung
4.	Gorong-gorong jalan penghubung	200	Km	Rampung
5.	Jalan Produksi Kelapa Sawit	20	Km	Rampung
6.	Jembatan Kayu	700	M	Rampung
7.	Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi	6	Buah	Rampung
8.	Rumah Petugas UPT	25	Buah	Rampung
9.	Balai Desa Untuk Musyawarah	5	Buah	Rampung
10.	Gudang Unit/KUD	5	Buah	Rampung
11.	Rumah Ibadah (Mesjid, gereja, dan Pura)	20	Buah	Rampung
12.	Pasar Desa	2	Buah	Rampung
13.	Sekolah Dasar	5	Buah	Rampung
14.	S L T P	1	Buah	Rampung
15.	Puskesmas Pembantu	5	Buah	Rampung
16.	Pos Yandu	5	Buah	Rampung
17.	Sarana Air Bersih dan Jambang Keluarga	100	Buah	Rampung

Sumber: Departemen Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tahun 1998/1999

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sebagaimana termaktub dalam tabel tersebut di atas pada prinsipnya sangat membantu warga transmigrasi dan mengelolah perkebunan, baik itu perkebunan plasma maupun perkebunan inti.

Dengan didirikannya gedung-gedung sekolah, rumah peribadatan, perbaikan jalan penghubung, pengadaan puskesmas dan posyandu tampaknya merupakan infrastruktur sosial yang berfungsi meninjau pelaksanaan kehidupan sosial dan kehidupan interpersonal antar warga masyarakat, khususnya di lingkungan PIR transmigrasi.

Pembangunan gudang dan unit pelaksanaan teknis disamping pengadaan pasar juga ikut memperlancar mekanisme kegiatan ekonomis sehari-hari warga transmigran, yang satu sama lain berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Disamping sarana/prasarana pendukung ini perusahaan inti juga mengupayakan penyediaan fasilitas yang memudahkan untuk memobilisir proses produksi, sehingga tingkat efisiensi diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fasilitas berupa sarana achievement (kelengkapan) yang dimiliki perusahaan ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 14

KEADAAN JUMLAH DAN JENIS ALAT BERAT, KENDARAAN, DAN MESIN-MESIN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN INTI SAMPAI DENGAN TAHUN 1999

No.	Uraian Jenis Sarana	Jumlah/Satuan	Keterangan
1.	Bulldozer	10 Buah	Terpakai
2.	Motor Grader	3 Buah	Terpakai
3.	Excavator	5 Buah	Terpakai
4.	Bomog Compactor	1 Buah	Terpakai
5.	Road Roller	1 Buah	Terpakai
6.	Wheed loader	2 Buah	Terpakai
7.	Fark Lift	2 Buah	Terpakai
8.	Back Hae	1 Buah	Terpakai
9.	Traktor	8 Buah	Terpakai
10.	Trailer 4 Ban	14 Buah	Terpakai
11.	Trailer 8 Ban	2 Buah	Terpakai
12.	Dump Truck	8 Buah	Terpakai
13.	Truck Dyna Rino	3 Buah	Terpakai
14.	Daihatsu Taft	5 Buah	Terpakai
15.	Jeep CJ - 7	1 Buah	Terpakai
16.	Toyota Kijang	2 Buah	Terpakai
17.	Daihatsu Pick Up	2 Buah	Terpakai
18.	Genzet	7 Buah	Terpakai
19.	Mesin Las	1 Buah	Terpakai
20.	Pompa Air	4 Buah	Terpakai

Sumber: Kantor PTP. Surya Raya Lestari II

5.3 Areal Tanaman Kelapa Sawit PTP. Surya Raya Lestari II

Areal tanaman kelapa sawit Perkebunan Inti Rakyat (PIR) PTP. Surya Raya Lestari II, pada prinsipnya merupakan gabungan antara perkebunan inti dan perkebunan plasma. Perkebunan inti yang dimaksudkan adalah perkebunan yang dikelola oleh perkebunan inti, sedangkan perkebunan plasma adalah perkebunan yang dikelola secara langsung oleh petani warga transmigran.

Latar belakang munculnya pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans Perkebunan Kepala Sawit ini adalah bertitik tolak dari program transmigrasi, dimana Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah tujuan transmigran asal Jawa dan Bali. Dengan adanya transmigran tersebut, maka pembukaan areal lahan dan pemukiman dikaitkan dengan konsep pengwilayahan komoditas, dimana wilayah Kecamatan Pasangkayu dan Budong-Budong sangat potensial dengan budidaya tanaman kelapa sawit.

Keheradaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKS) yang dikelola oleh PTP. Surya Raya Lestari II ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani warga transmigran sekaligus meningkatkan devisa melalui ekspor kelapa sawit, dengan melibatkan peranan ADD sebagai mitra kerja, baik sebagai mitra kerja perusahaan inti maupun mitra kerja petani transmigran dan pelancar fungsi sektoral.

TABEL 15

PERKEMBANGAN AREAL TANAMAN KELAPA SAWIT
PIR PKS TAHUN 1994/1995-1999/2000

No. Nama Afdeling	Luas Areal Tanaman (Ha)						Jumlah
	TT 94/95	TT 95/96	TT 96/97	TT 97/98	TT 98/99	TT 99/00	
I. INTI							
1. Bulili	22,0	352	250	174	2,23	-	773,35
2. Majene	129,13	59,20	293,94	39,70	28,05	-	550,02
3. Karabi	-	277	259	30	-	-	566
4. Dampela	-	-	-	72	14,25	-	86,26
5. L o o	85	284	241	116	-	-	726
6. kuma	-	-	-	160	-	-	160
Jumlah (I)	236,13	943,20	1043,94	591,70	44,66	-	2861,63
II. PLASMA							
1. Palapi	93	267	379	-	-	-	739
2. Maha	336	254	85	-	-	-	675
3. Besi	-	208	358	195,63	4,50	-	766,13
4. Barubu	-	-	743	292	36,07	-	1071,07
5. Godang	-	-	690,89	210,55	218,05	-	1119,49
6. Lariang	-	-	343	552	30	-	895
7. Rege	-	-	-	265	155,95	-	418,95
8. Siri	-	-	-	625,73	109	-	735,21
Jumlah (II)	429	729	2568,89	2138,91	554,05	-	6119,85
Total Areal (I + II)	665,13	1674,20	3612,83	3730,61	598,71	-	9281,48

Sumber: Tanaman Kelapa Sawit Kantor Dinas Kehutanan Tahun :
1998/1999

Dalam areal tanaman kelapa sawit PTP. Surya Raya Lestari II telah ditetapkan cara penanaman (teknik budidaya) dengan berpedoman pada petunjuk P3 Marihat yang khusus menangani kelapa sawit. Jenis bibit yang dipergunakan adalah varietas Dura (D), Pesipera (P) dan Dampy/Risapak (DP) yang diintroduksi dari P3 Marihat.

Pembibitan dilakukan dua kali yaitu prenurseri selama tiga bulan dan pembibitan lanjutan (Mainnurseri) yang memakai polybag dengan ukuran $50 \times 40 \times 0,20$ cm dengan lubang berjumlah 36 buah. Pembibitan ini dilengkapi dengan Sprinkel Irrigation System (SYS). Pemeliharaan lanjutan dilakukan melalui seleksi bibit, penyiangan, pemupukan dan penggemburan tanah.

Seleksi bibit dilakukan tiga kali yakni saat tanaman berumur 5 bulan, 8 bulan dan saat tanaman-tanaman diangkut ke lokasi kebun pertanaman. Sebelumnya itu, dilakukan Land Clearing (pembersihan tanah) dengan cara mekanis dan kemudian areal dibersihkan melalui pemupukan disertai pembakaran.

Jarak tanaman dilakukan dengan dua cara yakni $8,5 \times 8,5$ m dengan populasi tanaman sebanyak 157 pohon/Ha, sedangkan pada jarak 9×9 m, populasi tanaman 143 pohon/Ha yang disusun dalam bentuk segitiga sama sisi dan diantara pohon kelapa sawit dilakukan penutup tanah LCC, penyulaman, pengawetan tanah, dan pemberantasan gulma yang dilakukan bila perlu.

Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali setahun yakni pada awal dan akhir musim hujan. Jenis dan dosis pupuk yang dianjurkan P3 Marihat sangat bervariasi dan bergantung pada jenis tanah dan umur tanaman kelapa sawit. Namun, secara umum dosis pemupukan yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 16

DOSIS UMUM PEMUPUKAN KELAPA SAWIT
(GRAM/POHON/TAHUN)

No.	Umur (Tahun)	ZA	Rp	MOP	Kies
1.	Satu	250	500	200	150
2.	Dua	500	500	500	250
3.	Tiga	750	750	750	500
4.	Empat	1.000	750	750	750
5.	Lima	1.500	1.000	1.000	1.000
6.	Enam	2.000	1.250	1.500	1.250
7.	Tujuh	2.500	1.500	2.500	1.500
8.	Delapan	2.750	1.750	2.000	1.750
9.	Sembilan	3.000	2.000	3.000	2.000
10.	Dua Belas	3.000	2.000	3.000	2.000
11.	Dua Belas	2.250	750	1.750	1.000

Kegiatan penunasan (Prunning) dilakukan pada saat tanaman berumur dua tahun yang dilakukan setiap tujuh bulan secara berturut-turut. Sebelum areal dipollinasi, maka diadakanlah kastrasi. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan vegetatif akan lebih baik yang biasanya tiba sampai keluarnya putih bunga I hingga tanaman berumur 33 bulan.

Pollinasi itu dilakukan pada tahun pertama tanaman menghasilkan dengan rotasi perhitungan dua kali seminggu. Sedangkan pada tahun kedua dan ketiga, pollinasi hanya dapat dilakukan berdasarkan perhitungan bunga jantan yang atdesis perminggu. Jika bunga jantan melebihi 5 Ha, maka pollinasi tidak perlu dilakukan.

5.4 Tenaga Kerja Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

PTP. Surya Raya Lestari II sebagai perusahaan inti pengelola Perkebunan Kelapa Sawit Baras, secara organisatoris memiliki tenaga kerja dengan hierarkis yang berbeda-beda. Bervariasinya jenis tenaga kerja yang dipkerjakan pada perusahaan perkebunan ini dapat dilihat dari penanganan administrasi proyek. Untuk tingkat kebun dipimpin oleh seorang General Manager dibantu lagi oleh seorang Office Manager. Office Manager dibantu lagi oleh seorang Asistent Office Manager.

Penanganan administrasi fisik lapangan dipimpin oleh tiga orang Area Manager, yaitu yang wilayah kerjanya meliputi Baras Utara, Baras Selatan I, dan Baras Selatan II. Dalam hubungannya ini, perusahaan inti memiliki personil utama sebanyak 34 orang dengan jabatan mulai dari General Manager, sampai dengan Asistent Afdeling. Setiap Afdeling memiliki berbagai mandor yang memimpin buruh tani dalam bekerja di perkebunan. Pada setiap Afdeling dilakukan pula penadministrasian oleh masing-masing Asistent Afdeling yang secara berjenjang dilaporkan kepada Manager wilayah.

UNIVERSITAS
BOSOWA



TABEL 17

DATA KEFADAAN TENAGA KERJA (BURUH PERKEBUNAN) YANG
TERSERAP PADA PERKEBUNAN INTI RAKYAT SELAMA
LIMA TAHUN (TAHUN 1994/1995-1998/1999)

No.	Nama Afdeling	Jumlah					Jumlah
		TT 94/95	TT 95/96	TT 96/97	TT 97/98	TT 98/99	
I. INTI							
1.	Bulili	7	80	76	53	3	219
2.	Majene	45	21	126	28	34	254
3.	Karabi	-	93	80	24	-	202
4.	Dampela	-	-	-	32	13	45
5.	To o	36	82	78	84	-	280
6.	Kuma	-	-	-	30	-	30
Jumlah (I)		88	281	360	251	50	1.030
II. PLASMA							
1.	Palapi	34	76	90	-	-	200
2.	Maha	69	80	29	-	-	178
3.	Kesi	-	69	90	42	8	209
4.	Barubu	-	-	268	87	50	405
5.	Godang	-	-	245	92	90	427
6.	Lariang	-	-	89	121	13	223
7.	Rege	-	-	-	95	73	168
8.	Siri	-	-	-	180	70	250
Jumlah (II)		103	225	811	617	304	2.060
Total Areal (I + II)		191	506	1.171	868	354	3.090

5.5 Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mamuju

Untuk mengetahui berpengaruh tidaknya perkebunan kelapa sawit terhadap penyerapan tenaga kerja, akan dipergunakan Analisis Regresi Sederhana. Dalam analisis ini akan ditelaah tentang pengaruh antar dua variabel, yakni variabel yang dijelaskan atau dalam hal ini adalah penyerapan tenaga kerja dan variabel penjelasan atau dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit akan tampak dalam hubungan fungsional terhadap kedua variabel yang dimaksud itu.

Data mengenai hubungan kedua variabel ini dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 18

DATA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Tahun	Perluasan Areal Perkebunan (Ha)	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
1994/1995	665,13	191
1995/1996	1.674,20	506
1996/1997	3.612,83	1.171
1997/1998	2.730,61	868
1998/1999	598,71	354

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju 1999

TABEL 19

DATA PENGAMATAN LUAS LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PTP. SURYA RAYA LESTARI II DAN
PENYERAPAN TENAGA KERJA

Tahun	X (Ha)	Y (orang)	XY	X ²	Y ²
1994/1995	663,13	191	127.039,83	442.397,92	36.481
1995/1996	1.674,20	506	847.145,20	2.802.945,64	256.036
1996/1997	3.612,83	1.171	4.230.623,93	13.052.540,61	1.371.241
1997/1998	2.730,61	868	2.370.169,48	7.456.230,97	753.424
1998/1999	598,71	356	211.943,34	358.453,66	125.316
Jumlah	9.281,48	3.090	7.786.921,78	24.112.568,8	2.542.490

Adapun langkah-langkah pemanfaatan rumus analisis regresi (Sudjana, 1998, hal. 301) sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana Y = Variabel yang dijelaskan atau dalam hal ini adalah penyerapan tenaga kerja.

X = Variabel penjelasan atau dalam hal ini adalah luas lahan perkebunan kelapa sawit.

a dan b = Koefisien Regresi atau parameter yang di-taksir.

$$a = \frac{\sum Y - b\sum X}{n}$$

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$n = 5$$

Penjabaran rumus tersebut di atas, adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum Y}{n}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{9.281,48}{5} = 1.856,296 \\ X &= 1.856 \\ Y &= a + bX \\ b &= \frac{n (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2} \\ &= \frac{5 (7.786.921,78) - (9.281,48) (3.090)}{5 (24.112.568,8) - (9.281,48)^2} \\ &= \frac{(38.934.608,9) - (28.679.773,2)}{(120.562.844) - (86.145.870)} \\ &= \frac{10.254.835,7}{34.416.974} = 0,2979586 \\ b &= 0,2980 \\ a &= \frac{\sum Y - b \sum X}{n} \\ &= \frac{3.090 - (0,2980) (9.281,48)}{5} \\ &= \frac{3.090 - 2.765.881}{5} \\ &= \frac{324.119}{5} \\ &= 64,8238 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pemanfaatan rumus Analisis Regresi ini ternyata diperoleh nilai $XY = 0,98$ yang berarti bahwa $r^2 = 0,9604$ atau 96,04% lahan perkebunan kelapa sawit berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, atau dapat pula dikatakan bahwa berdasarkan perhitungan regresi ini dimana diperoleh nilai $b = 0,2980$ (positif) berarti setiap pertambahan atau perubahan satu (1) Hektar lahan perkebunan kelapa sawit dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 0,2980 orang.

Besarnya prosentase pengaruh lahan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perkebunan ini, mengungkapkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit pola Perkebunan Inti Rakyat PKS PTP. Surya Raya Lestari II dipandang dapat menyerap tenaga kerja. Oleh sebab itu hipotesa alternatif (H_1) yang diajukan dalam skripsi ini sudah dibuktikan kebenarannya secara empirik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Perkebunan kelapa sawit ini dikelola oleh PTP. Surya Raya Lestari II dengan menerapkan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yaitu penggabungan antara perkebunan inti dan perkebunan plasma dengan tenaga kerja utama adalah warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa, Bali, NTT, NTB, Bone, Tana Toraja dan Mamuju. Perusahaan perkebunan ini dikelola oleh 34 personal tenaga eksekutif andalan dengan jenjang hierarkis kepangkatan mulai dari General Manager (GM) sampai tingkat mandor.

Jumlah tenaga kerja (buruh tani) yang bekerja pada perusahaan inti adalah 3.090 orang dan keseluruhannya merupakan warga transmigran yang bermukim di Kecamatan Budong-Budong. Luas areal tanaman kelapa sawit yang dikelola sampai tahun 1999 adalah 9.281,48 Ha.

Keheradaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PTP. Surya Raya Lestari II pada hekekatnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, akan tetapi belum mampu meningkatkan kualitas hidup para buruh tani yang bekerja disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat upah borongan relatif rendah (4.000 - 5.000 Rupiah perhari), sarana/prasarana perhubungan tidak

efektif dan efisien yang satu sama lain kondisi ini sangatlah sukar meningkatkan pendapatan petani. Dalam hubungan ini kualitas hasil yang relatif masih rendah serta sistem pemasaran hasil yang kurang efisien menyebabkan petani seringkali kurang responsif terhadap program dan proyek-proyek yang bertalian dengan sub sektor perkebunan.

Dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang dihadapi para buruh tani transmigran yang bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka peranan ADO sebagai mitra kerja baik terhadap perusahaan inti maupun terhadap buruh tani berupa pengakomodasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan melibatkan peranan instansi teknik terkait, khususnya dalam pembinaan warga transmigran sebagai tenaga kerja utama dalam perusahaan.

Berbagai macam program yang telah disusun bersama antara pihak perusahaan perkebunan dan instansi pemerintah, khususnya Departemen Pertanian, Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dalam upaya mengoptimalkan sumber-sumber yang tersedia. Program yang dimaksud antara lain: Program peningkatan kualitas produksi, program peningkatan pemasaran, program peningkatan konversi tanah, program peningkatan dukungan dan keterkaitan yang

kuat antara sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya dalam pembangunan. Melalui program-program tersebut diharapkan adanya peluang bagi peningkatan pendapatan petani (buruh tani) dan keluarganya.

Pelaksanaan program pada sub sektoro perkebunan ini, diimplikasikan dengan kebijaksanaan peningkatan produktivitas, antara lain melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan peningkatan kemampuan PPL dan Balai Penelitian.

6.2 Saran

Berlitik tolak dari kerangka permasalahan yang termaktub dalam skripsi ini, penulis mengajukan saran:

1. Hendaknya sarana dan prasarana perhubungan di lokasi warga transmigran supaya ditingkatkan atau membuka jalur perhubungan darat yang layak, guna memperlancar mekanisme pengangkutan hasil-hasil produksi petani dalam menerobos pasaran. Mengingat bahwa masih banyak desa di Kabupaten Mamuju yang belum terjangkau oleh kendaraan beroda empat. Dalam hubungan inilah keterisolasian bagi petani merupakan dilema yang sangat mempengaruhi pilihan-pilihannya dalam upaya memperbaiki hidup.

2. Hendaknya perusahaan PTP. Surya Raya Lestari II sedapat mungkin menaikkan upah borongan para buruh tani yang bekerja di perkebunan. Hal ini dimaksudkan agar daya beli petani dapat meningkat sekaligus memperbaiki standar hidup atau taraf hidup para petani transmigran. Jadi Standar Upah Minimum sudah saat dipraktekkan dalam perusahaan PPS.



DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swasta, 1995. Pengantar Ekonomi Modern, Cetakan Pertama, Ikip Malang, Malang.
- Benggolo, Arie, 1997. Tenaga Kerja dan Pembangunan, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1991. Balai Pusat Statistik, Jakarta.
- Djyohadikusumo, Soemitro, 1998. Ekonomi Pembangunan, Cetakan Ketiga PT. Gramedia, Jakarta.
- Mubyarto, 1997. Pengantar Pertanian, Edisi Ketiga, LP3ES. Jakarta.
- Simaniutak, Payaman, 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sudjana, 1998. Metode Statistik, Edisi Kelima, PT. Tarsito, Bandung.
- Sudjito, Wirosarjono, 1998. Masalah Tenaga Kerja Disektor Formal, (Prisma) Tahun ke IX September, Jakarta.
- Swasono, Yodo, Endang Sulastiyandingsi, 1998. Metode Perencanaan Tenaga Kerja Tingkat Nasional, Regional Perusahaan. BPF, Yogyakarta.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, et al, 1990. Teori Strategi Pembangunan Nasional, Cetakan Kesepuluh Gunung Agung Jakarta.
- Todaro, P. Michael, 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid II Cetakan Ke Enam PT. Ghalia Indonesia Jakarta.